

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia (Marsela dkk, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, saat ini sedang dihadapkan dengan persoalan kemiskinan. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam masalah penanggulangan kemiskinan, seperti memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin, agar kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi jumlahnya (Deska dkk, 2021).

Masalah kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang belum sepenuhnya bisa dipecahkan oleh pemerintah sejak dahulu hingga sekarang. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dalam definisi ini, kemiskinan akan berkaitan erat hubungannya

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup bagi seluruh penduduk. Dalam hal ini, Indonesia tergolong sebagai salah satu negara yang berada dalam garis kemiskinan. Karenanya masih banyak sekali penghasilan yang dimiliki penduduknya yang menurut standar internasional masih kurang. Rendahnya tingkat kehidupan sering digunakan sebagai alat ukur dalam kesejahteraan warganya atau masyarakatnya (Bambang, 2015).

Besarnya angka kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya karena masalah jumlah penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Jika jumlah penduduk yang tinggi tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia maka akan berdampak kepada pengangguran disaat jumlah pengangguran bertambah, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selain jumlah penduduk yang besar, faktor ketenagakerjaan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan secara tidak langsung melalui pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada dan mampu untuk menyerapnya (Deska dkk, 2021).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (juta jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Juta)</b>	<b>Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)</b>
2019	251,4	24,78	9,41
2020	271,9	27,55	10,13
2021	273,8	27,54	10,06
2022	275,8	26,36	9,56
2023	278,0	25,90	9,32

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024.

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 251,4 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,78 juta jiwa dengan persentase 9,41%, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 271,9 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 dengan persentase 10,13, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 273,8 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa dengan persentase 10,06%, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 275,77 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta jiwa dengan persentase 9,56% dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 278 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,90 juta jiwa dengan persentase 9,32%. Artinya pada tahun 2019-2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 9,41% menjadi 9,32%.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki lanskap geografis dan sosial yang beragam, wilayah ini terdapat kekayaan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat penyebaran kemiskinan di provinsi tersebut. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah ketimpangan distribusi pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat, terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang tidak memadai di daerah-daerah tertentu semakin membatasi peluang ekonomi dan melanggengkan kesenjangan sosial, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (%)</b>
2020	9.700.000	776,86	8,00
2021	9.100.000	784,98	8,60
2022	9.200.000	777,44	8,40
2023	9.300.000	788,85	8,50

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2024.*

Berdasarkan Tabel 2, jumlah penduduk miskin di provinsi sulawesi selatan turun pada tahun 2020 yaitu sebesar 776,86 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 784,98 ribu jiwa kemudian turun pada tahun 2022 sebesar 777,44 ribu jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 788,85 ribu jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin di provinsi sulawesi selatan pada tahun 2023 disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan dampak pandemi covid-19. Faktor-faktor lokal seperti bencana alam atau ketidakstabilan politik juga berperan dalam meningkatkan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan paling besar muncul pada masyarakat-masyarakat di pedesaan yang dalam hal pemenuhan kebutuhannya belum dapat terpenuhi, namun bukan hanya pada masyarakat pedesaan saja masalah kemiskinan terjadi di kota-kota besar juga masalah kemiskinan masih tetap ada. Berbagai upaya dan pembangunan telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan terutama untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya yang menurut lembaga statistik bahwa setiap tahunnya angka kemiskinan di Indonesia menurun (Bambang, 2015).

Kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian besar petani pegunungan di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya akses terhadap modal, teknologi dan pelatihan yang memadai, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada produktivitas pertanian dan kelangsungan hidup petani pegunungan. Semua faktor tersebut membuat kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan sulit diatasi bagi petani pegunungan di Sulawesi Selatan (Setiawan,Rizqi Firdaus 2022).

Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang juga memiliki masalah kemiskinan petani pegunungan adalah Kabupaten Enrekang. Namun, akses terhadap sumber daya dan kebijakan yang memadai masih menjadi kendala yang dihadapi oleh petani pegunungan di Kabupaten Enrekang. Selain itu, infrastruktur yang kurang mendukung seperti jalan dan jaringan listrik juga mempersulit transportasi hasil pertanian dan perikanan ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengatasi kemiskinan petani pegunungan di Kabupaten Enrekang dan wilayah pegunungan lainnya di Sulawesi Selatan.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah penduduk (Ribu jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Kemiskinan</b>
2020	225,172	25,25	11,21
2021	227,520	25,13	11,05
2022	228,554	26,15	11,44

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2024.*

Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang sebanyak 225,172 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin

sebanyak 25,25 ribu jiwa dengan persentase 11,21%, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 227,520 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,13 ribu jiwa dengan persentase 11,05% dan pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 228,554 ribu jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,13 ribu jiwa dengan persentase 11,44%. Artinya pada tahun 2020-2022 jumlah penduduk miskin di kabupaten enrekang mengalami peningkatan dari 11,21% menjadi 11,44%.